

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banten adalah salah satu tempat yang mampu melahirkan para ulama besar dan para pejuang tanah air. Salah satu tokoh yang masyur yang berasal dari Banten adalah Syekh Nawawi Al- Bantani, Keulamaan beliau sudah tidak di ragukan lagi dan sangat dihormati pada abad ke-18 hingga sekarang oleh tokoh-tokoh Islam Indonesia dan lapisan masyarakat. Pengaruh besar dari Syekh Nawawi Al-Bantani membawa dampak besar terhadap perkembangan keilmuan muridnya, salah satu muridnya yang berhasil dalam meneruskan langkah gurunya tersebut adalah almarhum *Hadraatussyekh* Kyai Hasyim As'ari yaitu pendiri Nahdatul Ulama (NU) .

Banten menjadi salah satu tempat yang menyimpan banyak cerita sejarah, salah satu dari banyaknya cerita sejarah yang ada di Banten yaitu tentang sejarah pasar sebagai pusat perekonomian, dapat dilihat dari catatan *Williem Lodewyckz* juru tulis *de Houtman* yang mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596, yang mengatakan sebagai berikut: disebut timur Kota yaitu Daerah

Karangantu terdapat sebuah pasar yang pagi maupun siang terdapat pedagang-pedagang dari Portugis, Arab, Turki, Cina, Keling, Pegu, Malaya, Bengali, Gujarat, Malabar dan Abesinia. Juga terdapat pedagang-pedagang dari Nusantara seperti dari Bugis, Jawa dan lain-lain. Pasar kedua terletak di Paseban, yang memperdagangkan keperluan sehari-hari dan pasar ketiga terletak di Pacinan yang dibuka sebelum dan sesudah pasar-pasar lain tutup. Barang-barang yang di perdagangkan dari pasar ketiga ini bermacam ragam, mulai dari kain sutra dari Cina dan Gujarat, sampai sisir dan kipas, diceritakan pula bahwa barang-barang tekstil dari Gujarat ini terdiri dari 20 jenis, transaksi perdagangan di pasar ini berjalan mudah karena mata uang dan pertukaran mata uang (*money changer*) sudah di kenal.¹

Menoleh kepada sejarah perkonomian tentunya Banten merupakan pusat berkembang perekonomian yang sangat terkenal dari dalam maupun luar Negara, pesatnya interaksi bisnis membuat masyarakat Banten pada masa Maulana Muhammad (1580-1596) mempunyai tatanan kehidupan yang sejahtera. Namun seiring

¹Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*, (Serang: Saudara Serang cet IV, 2011, dan di terbitkan kembali oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten), h. 95

berjalannya waktu padatnya penduduk yang disebabkan oleh melejitnya pertumbuhan populasi penduduk di Indonesia, hal itu memicu pada keadaan ekonomi masyarakat yang semakin melemah, dimana dampak dari terus bertambahnya angka penduduk di Indonesia membuat lapangan pekerjaan semakin menyempit dan membuat masyarakat merasakan dampak kemiskinan, di Negara Indonesia adanya persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam pemilihan calon kandidat para pekerja membuat mereka yang tidak masuk kategori merasa bingung dan kecewa, adanya acuan persyaratan yang digaris bawahi dari batasan pendidikan dan kemampuan yang mumpuni dalam bidang tertentu menjadi momok yang menakutkan bagi mereka yang tak memiliki dua poin tersebut. Faktor lain yang menjadikan masyarakat menjadi pengangguran adalah: jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tak seimbang, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia, tenaga kerja yang ada di daerah dan di Kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang, harapan yang terlalu tinggi untuk tenaga kerja, adanya pemutusan hubungan kerja (phk), persaingan pasar global, masalah geografis/ jauh dari perkotaan, dan kemiskinan.

Tentunya manusia diberikan akal fikiran yang sangat sempurna oleh Tuhan, anugerah itu perlu digunakan dengan sebaik-baiknya oleh kita sebagai umat-NYA, maka dari pada itu perlunya pemikiran yang tepat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Permasalahan ekonomi di Indonesia bukanlah hal yang baru, hal ini menjadi masalah yang serius yang sampai sekarang belum mendapatkan titik terang dalam penyelesaiannya, mengingat masih banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia membuat suatu kenyataan yang memperihatinkan.

Dampak dari tingginya angka pengangguran karena sulitnya lapangan pekerjaan sedangkan kebutuhan untuk hidup harus terus terpenuhi setiap harinya membuat pola fikir golongan masyarakat menjadi lebih sederhana, bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang cepat dan mudah, salah satu cara yang ditempuh adalah menjadikan profesi mengemis sebagai sumber pendapatnya.

Di kota Serang sendiri populasi pengemis masih kerap kali terlihat ditempat-tempat umum seperti Lampu Merah, Terminal, Halte, Jembatan penyebrangan, dan tidak luput dari perhatian yaitu tempat religi yaitu Patilasanan Kesulthanan Syeh Maulana

Hasanuddin Banten, tempat religi identik dengan sejarah tempat keagamaan dalam penyebaran syariat agama Islam, selain situs sejarah, Masjid Agung Banten menjadi destinasi wisata bagi masyarakat, selain untuk berziarah masyarakat bisa menikmati dan melihat situs sejarah yang ada, wisata religi Masjid Agung Banten tidak pernah sepi dari pengunjung, situasi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk meraup keuntungan dengan cara berjualan, namun ada juga yang memaanfaatkan dengan cara negatif yaitu mengemis, mengharap belas kasihan dari wisatawan yang datang. Pemandangan tersebut membuat berkurangnya citra keindahan dari tempat wisata itu sendiri.

Peran fungsi pemerintah yang berwenang sangat dominan dalam penyelesaian masalah kesejahteraan masyarakat di Kota Serang ini terkhusus Daerah masjid Agung Banten, pengemis adalah salah satu profesi yang termasuk kepada penyakit masyarakat yang masih sangat banyak kita jumpai dan amat sulit untuk diberantas. Pengemis dapat dikelompokkan menjadi 2 macam tipe yaitu pengemis miskin materi dan pengemis miskin mental. Pengemis miskin materi adalah pengemis yang tidak memiliki uang atau harta, sedangkan pengemis miskin mental yaitu pengemis yang masih

memiliki harta namun mental yang lemah mendorongnya untuk mengemis.²

Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 dijelaskan bahwa penyakit masyarakat meliputi:

1. Pelacur dan penyimpangan seksual
2. Waria yang menjajakan diri
3. Minuman beralkohol
4. Gelandangan dan Pengemis
5. Anak jalanan
6. Kegiatan yang dilarang pada bulan ramadhan³

Banyak cara yang dilakukan oleh para pengemis dalam menjalankan profesinya contohnya mengamen dengan alat musik seadanya, meminta- minta dengan menggunakan kostum badut, memanfaatkan suatu kekurangan dalam dirinya (cacat), meminta- minta dengan secara sedikit memaksa sehingga membuat masyarakat memiliki perasaan risih dan takut tersendiri bahkan ada oknum ibu yang menggendong anaknya yang masih bayi dibawa

² Irawan, Dimas D, (*Pengemis Undercover*), Jakarta:Titik Media Publisher., 2013, h.13

³“Peraturan Derah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat”<http://jdih.serangkota.go.id/>, diakses pada tanggal 15 juli 2010.

untuk mengemis dan meminta-minta dengan cara memasang wajah memelas guna menarik simpati kepada orang-orang disekitarnya untuk berbelas kasihan kepadanya, anak adalah salah satu korban yang terbawa lingkungan menjadi seorang pengemis.

Pemerintah yang berwenang berhak untuk terus mengupayakan jalan keluar akan permasalahan kesejahteraan yang terjadi pada masyarakat di Kota Serang ini untuk terus memiliki kemajuan, Peran Dinas Sosial Kota Serang sangatlah dominan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai banyaknya pengemis di Kota Serang ini, Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan asas hukum (*rechstaat*). Sebagai Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sudah sepatutnya masalah sosial ini lebih dilirik dan dipecahkan permasalahannya, terlebih menjadi sorotan dalam maupun luar negeri. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa yang disebut pekerja profesional adalah seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja dan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan atau pengalaman praktik

pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk skripsi, dengan judul skripsi yaitu Implementasi Perda Kota Serang Nomor 02 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (studi kasus di Banten Lama) maka, rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan peraturan Daerah Kota Serang Nomor 02 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat mengenai pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan pengemis ?
2. Bagaimana Faktor terciptanya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyakit masyarakat?

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1.

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarah dan tidak meluasnya pembahasan pokok permasalahan pada penelitian ini maka penulis akan memfokuskan dan menghubungkan kepada latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka penelitian ini berfokus untuk meneliti dan mengetahui :

1. Peran fungsi pemerintah yang berwenang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyakit masyarakat mengenai pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan pengemis.
2. Untuk meneliti dan mengetahui Faktor terciptanya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyakit masyarakat mengenai pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan pengemis.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang No. 2 Tahun 2010 tentang penyakit

masyarakat mengenai pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan pengemis.

2. Untuk mengetahui faktor terciptanya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010.

E. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor yang menyebabkan penulis memilih penelitian ini atas dasar nilai manfaat dari penelitian ini sangat besar bagi semua pembaca, dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah terkhusus untuk pengkajian hukum Peraturan Daerah (PERDA), serta menjadi acuan atau referensi bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang di bidang Ilmu Hukum Tata Negara.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya pemerintah di Kota Serang dalam bentuk pelaksanaan dan fungsi kewenangannya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya maka penulis melakukan penelusuran terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang relevan dengan ini penelitian di beberapa sumber penulis temukan penelitian tersebut diantaranya:

1. Guslim Firda Riski, Fakultas Hukum Universitas Semarang Tahun 2020 yang berjudul:” penanganan pengemis usia produktif oleh dinas sosial berdasarkan PERDA kota Semarang nomor 05 tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang” dari pembahasannya dijelaskan: Penanganan pengemis usia produktif oleh Dinas Sosial berdasarkan PERDA Kota Semarang nomor 5 tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dikota Semarang terbagi menjadi dua kategori yaitu:
 - a. Penanganan pengemis usia produktif masa sekolah dengan tahapan penangannya adalah dengan sosialisasi, razia, pendataan, pembinaan, pemulangan daerah asal pengemis.

- b. Penanganan pengemis usia produktif masa sekolah dengan tahapan penanganan yang lebih diawasi oleh Dinas Sosial Kota Semarang terkait usaha yang dilakukan oleh pengemis atas pemanfaatan pemberian modal usaha. Persamaannya: sama-sama meneliti tentang pengemis dan perbedaannya adalah skripsi ini lebih kepada kinerja aparat pemerintah yang berwenang atas terealisasinya PERDA Kota Serang nomor 02 Tahun 2010 di Daerah Banten Lama, sedangkan skripsi Guslim Firda Rizki menjelaskan lebih berfokus kepada rehabilitasi anak-anak pengemis dalam usia produktif masa sekolah.
2. Nazza Qisthi Wahyuri, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2018, yang berjudul: “Pembinaan Agama Terhadap Anak Gelandangan dan Pengemis (gepeng) di UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai”, dalam pembahasannya dijelaskan bahwa : dalam pembinaan agama di UPT, Pembina menyampaikan tiga macam materi pembinaan kepada anak-anak gelandangan dan pengemis

yaitu pembinaan ahlak, pembinaan akidah dan pembinaan ibadah, ada 6 metode yang digunakan oleh Pembina dalam kegiatan pembinaan agama terhadap anak-anak gelandangan dan pengemis. Keenam metode itu adalah :metode ceramah, metode kisah-kisah, metode bermain, metode diskusi dan metode praktek langsung,dan metode pembiasaan. Persamaanya, sama-sama meneliti tentang pengemis, adapun perbedaan skripsi ini lebih spesifik kepada kinerja aparat setempat dalam menjalankan peraturan Daerah Banten lama sedangkan skripsi Nazza Qishti Wahyuri lebih meruncing kepada pembinaan agama untuk anak gelandangan dan pengemis di Kota Binjai.

3. Syukri Imami, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banten tahun 2018 yang berjudul:” Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat (studi kasus PSK di Kota Serang)”, dari pembahasannya dijelaskan: Salah satu penyakit masyarakat yang disebutkan dalam PERDA kota Serang yaitu PSK (pekerja seks komersial) pada kenyataannya di Kota Serang yang bermotto

Serang Madani ini masih banyak pekerja PSK yang senantiasa bisa ditemui di wilayah tertentu di Kota Serang seperti Kepandean Kota Serang, Terminal Kota Serang dan Alun-alun Kota Serang, banyak faktor yang mendukung seseorang menjadi seorang PSK diantaranya karena paksaan dari suami, menjadi tulang punggung keluarga setelah bercerai, dan untuk membiayai adik yang berjumlah lebih dari 1 jiwa, dalam kenyataannya pelaksanaan PERDA Kota Serang nomor 2 tahun 2010 belum terealisasi dengan benar pasalnya dalam isi PERDA terdapat sebuah sanksi yang harus diberikan kepada pelaku pekerja PSK tersebut namun tidak diberikan atas dasar masih kemanusiaan, dari sini bisa terlihat bahwa kurangnya penegasan dalam implementasi PERDA. Selain itu terhitung beberapa penghambat berjalannya Perda Kota Serang diantaranya: 1. Ketelambatan dalam penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana. Persamaannya adalah: sama-sama menjelaskan tentang PERDA Kota Serang nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penaggulangan di Kota

Serang. Perbedaannya : skripsi A. Syukri Imami meneliti tentang problematik kehidupan PSK (Pekerja Seks Komersial) di Kota Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) menyatakan” *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” apa yang tertulis pada pasal tersebut menjadi penanda bahwa hukum harus menjadi panglima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara selain itu, karena UUD 1945 sebagai suatu sistem maka keberadaan pasal ayat (3) UUD 1945 harus dikaitkan dengan pembukaan UUD 1945. Dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 ditetapkan tujuan dan fungsi Negara, dan dengan adanya keberadaan pasal 1 ayat (3) tersebut bermakna bahwa hukum hanyalah salah satu sarana yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuan Negara. sehingga dapat dikatakan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh hukum adalah sebagai berikut:

“Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mentertibkan dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

*perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adill dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.*⁵

Di Indonesia keadilan berpacu kepada pancasila yang terdapat pada sila yang kelima, yang dimana mengandung dasar dalam pondasi penentuan hukum. Sedangkan teori keadilan menurut pada ahli barat adalah sebagai berikut:

1. Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.⁶

⁵Ahmad “*Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan*” Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, h. 48.

⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk.Kedelapan Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 174.

2. Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat kepada keadilan dalam hasil kongkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan- keinginan manusia melalui pengendalian sosial, suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif.⁷

Untuk dapat tegaknya suatu hukum didalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur yang diantaranya:

1. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penetuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi dari tingkatannya.

⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h, 174.

2. Berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat.
3. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai fositif yang tinggi.⁸

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota, hingga Kepala Desa tentu saja mengharapkan seluruh rakyatnya mendapatkan kesejahteraan, yaitu dimana masyarakat bisa merasakan kehidupan yang layak. Negara memikul tanggung jawab pertama berkenaan dengan merajalelanya kefakiran, penyakit, kebodohan, penyimpangan dan berbagai penyakit sosial berbahaya lainnya yang menghancurkan persatuan masyarakat.⁹

Manusia memiliki hak dan kewajiban setelah lahir kemuka bumi, hak dan kewajiban sudah melekat pada setiap individual tanpa bisa diganggu gugat, sebagaimana terkandung dalam Undang-

⁸Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cet Ke-4, genta Publising, Semarang, 2009, h.17

⁹Raghib As-siraji, *Solidaritas Islam Untuk Dunia*, (Jakarta, Pustaka al-kausar: 2015) h.48

Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 Ayat

(1) menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan yang Maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Masalah Keselarasan dalam tatanan hidup yang sejahtera terus menjadi pemicu pemerintah dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah bertugas dalam pemberantasan kemiskinan yang masih terjadi di Indonesia.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2007 pasal 7 ayat 2 huruf G tentang penanggulangan penyakit sosial, Pemerintah Kota Serang berwenang dan memiliki hak yang penuh dalam dalam menjalankan kewenangan guna upaya mengatasi masalah penyakit sosial, dalam memberikan kewenangan terkhusus dibidang kesejahteraan sosial Pemerintah Kota Serang mendelegasikan kepada Dinas Sosial untuk mampu menjalankan wewenang tersebut. Maka dari pada itu Dinas Sosial dituntut untuk terus memberikan sebuah inovasi pergerakan yang terbaru guna mengeluarkan masyarakat dalam lingkaran

kemiskinan. Tentu saja dalam menjalankan hak dan wewenang untuk mensejahterakan rakyat banyak kendala-kendala yang menghalangi Dinas Sosial untuk melaksanakan hak dan kewenangannya, sehingga kurang optimalnya dalam pelaksanaannya. Karena hal tersebut penulis ingin mengetahui apa saja kendala yang menghalangi proses kesejahteraan masyarakat, mungkin dengan skripsi ini penulis berharap Dinas Sosial dapat lebih termotivasi dalam menjalankan wewenangnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi (data) logis untuk beberapa kegunaan tergantung pada tujuan dari dilaksanakannya penelitian.¹⁰ Adapun berkaitan dengan metode penelitian dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan aspek metode penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu kualitatif, yang mana metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

¹⁰ Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 210.

kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memperhatikan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi. Observasi ialah ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk yang dapat memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis, jadi observasi dapat di lakukan hanya pada perilaku/sesuatu yang tampak, sehingga potensi perilaku seperti sikap, pendapat jelas tidak dapat diobservasi. Di samping itu sesuatu disebut observasi apabila mempunyai tujuan; melihat, mengamati, mencermati sesuatu perilaku tidak dapat disebut observasi jika tidak memiliki tujuan.

b. Wawancara

Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan, namun percakapan yang bertujuan, wawancara amat perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif, karena

banyak hal yang tidak mungkin dapat di observasi langsung, seperti perasaan, motif, pikiran, serta pengalaman masa lalu responden/informan.

Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mempunyai pemahaman yang tepat akan topik yang akan digali sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Patton (1980) terdapat enam jenis pertanyaan yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapat jenis informasi yang berbeda dari responden yaitu:

- 1) Pertanyaan pengalaman/ perilaku, dimaksudkan untuk memperjelas deskripsi pengalaman, perilaku, tindakan, yang sudah di observasi.
- 2) Pertanyaaan pendapat/nilai, untuk mengetahui apa pendapat orang tentang dunia dan tentang kegiatan tertentu, tujuan mereka, keinginan mereka, dan nilai-nilai mereka.
- 3) Pertanyaan perasaan, untuk memahami respon emosi atas pengalaman dan pemikiran orang.

- 4) Pertanyaan pengetahuan, untuk menggali pertimbangan/ pengetahuan mereka akan informasi aktual terkait dengan topik penelitian.
- 5) Pertanyaan sensasi, untuk mengetahui bagaimana sensitivitas sensoris dari responden.
- 6) Pertanyaan latar belakang/demografis, untuk mengetahui posisi/lokasi responden dalam relasinya dengan orang lain seperti usia, suku, tempat tinggal, dan pendidikan.¹¹

c. Dokumentasi

Yaitu merupakan foto-foto yang diambil ketika waktu penelitian.

3. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan pada skripsi ini berpedoman kepada:

1. Pedoman Penulisan Karya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Banten
2. Penulisan Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan (EYD) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹¹ Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian*...h. 214.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti, menafsirkan dan menemukan kesimpulan dari fenomena yang diperoleh dari lapangan, menghubungkan data dan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran, lalu menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh sehingga menemukan makna dengan memperhatikan rumusan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan identifikasi masalah.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Fokus Penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
- G. Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

I. Sistematika Penulisan

BAB II : Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

A. Sejarah Kerajaan banten

1. Kondisi Geografis Kota Serang
2. Kondisi Geografis Banten Lama
3. Kondisi Sosial Kota Serang

B. Profil Kota Serang

1. Letak Demografis dan Geografis Kota Serang
2. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Serang
3. Kondisi Sosial Kota Serang
4. Kondisi Ekonomi Kota Serang
5. Visi dan Misi Kota Serang
6. Struktur Organisasi Kota Serang

C. Profil Dinas Sosial Kota Serang

1. Sejarah berdirinya Dinas Sosial di Kota Serang
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Serang
3. Kondisi Geografis Dinas Sosial Kota Serang
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Serang

BAB III :Kajian Teoritis

- A. Tinjauan terhadap Peraturan Daerah
 - 1. Pengertian Peraturan Daerah
 - 2. Landasan Peraturan Pembentukan Peraturan Daerah
 - 3. Materi Muatan Peraturan Daerah
 - 4. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5. Materi Muatan Undang-Undang
- B. Kewenangan Pemerintah Daerah
 - 1. Pengertian Kewenangan
 - 2. Sumber Kewenangan
- C. Pemerintah Daerah
 - 1. Pengertian Pemerintah Daerah
 - 2. Pemerintah Kabupaten/ Kota
 - 3. Hubungan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah
- D. Pengemis
 - 1. Arti Pengemis
 - 2. Macam-macam pengemis
 - 3. Faktor pendukung menjadi pengemis
- E. Kesejahteraan

1. Pengertian kesejahteraan
2. Faktor-Faktor Kesejahteraan

BAB IV: Pembahasan Hasil Penelitian

Dari penelitian yang telah dikaji maka pembahasan tentang hasil akhir dari penelitian menguraikan tentang:

1. Fungsi Kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat di Kota Serang
2. Pelaksanaan Pemerintah Kota Serang menurut peraturan daerah Kota Serang Nomor 02 Tahun 2010
3. Perlindungan Hukum terhadap pengemis

BAB V: Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DOKUMENTASI

